

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA RAPPOALA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA RAPPOALA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan di usulkan oleh :

Rahmat Hidayat

105640211815

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa
Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Gowa

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 105640211815
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Ahmad Taufiq, S. IP., M. AP

Mengetahui

Dekan

Fito Enismuh Makassar

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si
NBM. 730727

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

HALAMAN TIM PENILAI

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 053/FSP/A.4-II/VII/43/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 16 Juli 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

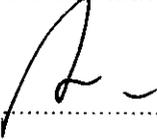
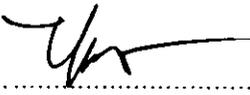

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


A. LUHUR PRIANTO S.IP, M.Si

NMB : 730727

NMB : 992 797

PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua) ()
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 105640211815
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”** adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 06 April 2021

Yang Menyatakan



Rahmat Hidayat

ABSTRAK

Rahmat Hidayat 105640211815. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh **Yahya Mustafa dan Ahmad Taufiq**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Desa Rappoala; 2) Direktur BUMDES 3) Manajer Unit Industri 4) manajer unit biro jasa Bumde dan 5) Masyarakat. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa; dilihat dari aspek 1) Pemberian modal sebesar 120 juta yang di peruntukkan ke bumdes dalam hal ini pengembangan pengelolaan buah markisa menjadi minuman sirup, tujuan dan visi misi Bumdes Tombolo Batara Rappoala maka kebijakannya lebih kepada penekanan regulasi ekonomi masyarakat jadi masyarakatnya yang utama untuk kita kembangkan untuk diberdayakan agar menjadi masyarakat mandiri, aspek 2) prasarana usaha tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan peneri, 3) pendampingan masyarakat dimana pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya, dan 4) penguatan kelembagaan pemerintah Desa Rappoala serta dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai Kami pengelola BUMDes tetap melakukan planning step by step atau perencanaan yang tertib.

Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat, Bumdes

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”** yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Muhammad Yahya, M.Si., selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Ahmad Taufiq, S. IP., M. AP selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rappoala, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.
6. Saudara-saudaraku Saenal abiding, Firdaus dan Alwin Dwi Saputra yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.
7. Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
8. Kepada seluruh keluarga **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan **EXECUTIVE 2015** yang

selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moral dan mendampingi penulis disegala kondisi.
10. Teman-teman IP 2015 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kelas IP B 2015 yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 06 April 2022

Rahmat Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENILAI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pemberdayaan Masyarakat	9
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14
D. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	20
E. Kerangka Pikir	27
F. Fokus Penelitian	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Objek Penelitian	34

B. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	41
1. Pemberrian Modal.....	41
2. Prasarana Usaha	48
3. Pendampingan Masyarakat.....	53
4. Penguatan Kelembagaan.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)*, (Jakarta: Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2007),

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes (badan usaha milik desa) dapat menghimpun dana masyarakat di tingkat lokal Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mengembangkan unit usaha dan mendayagunakan potensi ekonomi, terbuka kemungkinan suatu saat BUMDes menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan BUMDes sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidakpahaman warga akan BUMDes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa dan supra desa, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama salah satunya adalah BUMdes (Badan Usaha Milik Desa). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan

Pemaknaan sebagai berikut: (1)BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2)BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha

ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMdes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Kementrian Desa Daerah tertinggal, diakses pada 09 April 2021).

Namun cita-cita tersebut belum tercapai secara maksimal seperti yang diketahui bahwa masih banyak desa yang terkategori sebagai desa tertinggal daripada kategori desa maju. Penelitian yang dilakukan Ni Luh Wiagustini, bahwa tidak tercapainya cita-cita tersebut karena strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMdes kurang tepat sasaran. Strategi yang tepat untuk mendorong berkembangnya BUMdes sebagai salah satu unit lembaga kredit desa adalah model kemitraan terpadu. Dimana model tersebut sangat diperlukan dalam sebuah lembaga kecil agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang lebih besar seperti pihak swasta. Karena salah satu tujuan berdirinya BUMdes adalah menjembatani antara masyarakat desa dengan pihak pasar (Wiagustini, 2015).

Efektifitas pendirian Badan Usaha Milik Desa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Hal dasar yang di cita-citakan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Hal itu pula yang menjadi pendorong Pemerintah di Kabupaten Gowa untuk menjalankan secara efektif dan menyeluruh.

Sebelum adanya BUMdes, kondisi sosial masyarakat setempat masih kekurangan. Banyaknya masyarakat yang menjadi buruh di desa tetangga bahkan

masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini tentu menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga terlebih jika masih ada yang mengenyam pendidikan.

Di Kabupaten Gowa, Mengingat potensi perekonomian Desa Rappoalla seperti perkebunan sawa dan sayur-sayuran. Dari adanya potensi tersebut dan jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya BUMDes keinginan masyarakat terwujud seperti yang dulunya rumah semi permanen sudah permanen, sudah memiliki kendaraan yang sebelumnya tidak ada dan membuka peluang usaha masyarakat. Permasalahannya berdasarkan prariset bahwa kurang optimalnya dan belum mengetahuinya simpan pinjam dalam program BUMDes. Berdasarkan alirannya mengingatkan latar belakang dan fenomena diatas penulis tertarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
2. Bermanfaat guna menghasilkan konsep dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Kabupaten Gowa dalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang mengkaji tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syafrida yang berjudul “pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”, (2018), Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa di desa Dalu X A, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga toko lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Atsil M.A, yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, (2017), Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang proses pengembangan ekonomi

masyarakat melalui BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Satika Rani, yang berjudul "Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan". (2018). mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang peran dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki Manfaat yang bagus untuk masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu

memandirikan masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menggunakan tahapan pemberdayaan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya,

kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya

mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut (Soeharto,2006) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan social ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
- b. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*)
- c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
- d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
- e. Pengelola dan dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- b. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- c. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
- d. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.

- d. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.
- e. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- f. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- g. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- h. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada hakikatnya upaya-upaya pembangunan di tingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesejahteraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, semua stakeholders sebagai pelaku perubahan sebagai perubahan dalam proses pembangunan berupa memberdayakan warga komunitas (dari kekurangan berdaya menjadi lebih berdaya) baik dari tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan lebih baik (Fredian Tonny Nasution, 2014)

Wuradji yang dikutip oleh Azis pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menanganiberbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengann harapan (Zubaidi,2013).

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan khusus, melaksanakan program khusus. Dan banyak lagi program-program yang kita jalankan selama ini, agar rakyat kita makin kedepan makin berkemampuan. Menurut (Zamzami, 2009). Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melaksanakan dua program khusus yaitu:

- a. Program yang pertama adalah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin. Misalnya beras untuk rakyat miskin, kemudian askeskin, BOS, subsidi untuk berbagai profesi petani dan lain-lain.

- b. Program kedua adalah menyediakan lapangan kerja, yang bisa langsung mengurangi kemiskinan, itu bisa dikembangkan lebih baik lagi, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, termasuk koperasi

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Berkelanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini, maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan memberikan akses bagi setiap pelaku.

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh *United Nations* meliputi:

- a) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk pemberdayaan karakteristik yang memberdayakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

- b) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai,

sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan yang baik formal maupun informal.

c) *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh hubungan dari peminana, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

d) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

e) *Helping people to identify their most pressing problems.*

Masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan masalahnya dalam suasana kebersamaan. Upaya pemberdayaan, seperti dikatakan Kartasmita harus dilakukan tiga arah. Pertama menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan maka pemberdayaan mengupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan peningkatan potensi-potensi yang dimiliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui

aski-aksinya, pendidikan, pelatihan, peningkat kesehatan, pemberian modal, lapangan kerja, pasar, dan prasarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat hal ini berarti dalam memberdayakan masyarakat perlu di upayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang.

2. Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Produksi, distribusi, dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus menikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelolah sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.

Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

3. Sistem Pemberdayaan Ekonomi

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi menurut (Mardi Yatmo Hutomo 2000) meliputi:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan

penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersamabersama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak

berarti menganalisa pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody* pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: "Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”.

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes di atur dalam pasal 87 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Ayat 1: “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b. Ayat 2: “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c. Ayat 3: “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 88

- a. Ayat 1: “pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa.
- b. Ayat 2: “Pendiri BUMDes sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan “BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat

melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaannya itu antara lain:

- a. Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar .
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usah antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

3. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Prinsip BUMDes

1. Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bias mengakses semua kegiatannya.
2. Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
3. Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.
4. Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

b. Prinsip umum pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah

desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
5. Akuntable, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi alokasi dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan agar lebih berdaya. Hal ini adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes.

Hal yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*Cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalinkan semua keretakan disemua lapisan masyarakat desa. sehingga itu menjadi gaya gotong royong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

4. Pembentukan Bumdes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui

pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial (Wahyudin kessa, 2015).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang bertuang dalam peraturan menteri dalam

Gambar 2.1
Bagang Kerangka Pikir



F. Pokus Penelitian

Yang menjadi focus penelitian dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes) dikabupaten Gowa, dengan menggunakan teori Sistem pemberdayaan ekonomi (Mardi Yatmo Hutomo 2000) dengan indicator teori (1) bantuan modal, (2) bantuan

pembangunan prasarana, (3) bantuan pendampingan, (4) penguatan kelembagaan, (5) penguatan kemitraan usaha.

G. Deskripsi Pokus Penelitian

1. Bantuan Modal, Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.
2. Bantuan Pembangunan Prasarana, Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan, Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersamabersama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan Usaha, Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti menganalisa pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody* pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 03 Mei sampai tanggal 06 Juni 2022 di Desa Rappoala Kab. Gowa pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

D. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik Purposive yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah

1. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa
2. Pendamping Bumdes
3. Aparat desa Rappoala
4. Masyarakat Rappoala

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 KM² atau sekitar 3,01% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan yang meliputi 167 desa/kelurahan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa dibagi menjadi 2 golongan kecamatan berdasarkan sebagian besar wilayah, yaitu kecamatan dataran rendah dan kecamatan dataran tinggi. Luas kecamatan bervariasi dengan tingkat kelerengan daerah yang bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Terdapat 9 kecamatan yang terletak di dataran rendah dan 9 kecamatan di dataran tinggi. Ibu kota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pallangga, dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Disamping itu, dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa, terdapat 3 kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan luas 221,26 KM² atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 KM² atau 13,37% dari luas Kabupaten Gowa dan Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84 KM² atau 11,26% dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Berikut tabel mengenai luas daerah dan pembagian daerah administratif di Kabupaten Gowa.

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Disamping itu, dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa, terdapat 3 kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan luas 221,26 KM² atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 KM² atau 13,37% dari luas Kabupaten Gowa dan Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84 KM² atau 11,26% dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan.

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan Setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 652.941 jiwa. Pada tahun 2011 bertambah 659.513 jiwa atau sebesar 5,45%. Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan struktur umur tahun 2011, kelompok umur 5-9 tahun yang terbanyak dengan jumlah 69.707 jiwa dan kelompok umur 60-64 tahun terkecil dengan jumlah 7.605 jiwa.

Jumlah penduduk menurut angkatan kerja di Kabupaten Gowa pada tahun 2011 berjumlah 298.089 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 188.640 jiwa dan perempuan dengan jumlah 109.449 jiwa. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 298.089 jiwa, terdapat 178.012 jiwa laki-laki yang bekerja dan 10.628 jiwa laki-laki yang mencari pekerjaan. Sedangkan jumlah seluruh penduduk perempuan yang bekerja adalah sebanyak 99.048 jiwa dan

yang mencari pekerjaan sebanyak 10.401 jiwa. Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa bekerja di sektor pertanian, yaitu berjumlah 62,460 jiwa laki-laki dan 21.453 perempuan.

3. Gambaran Umum Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Duampanuae didirikan pada tanggal 4 Januari 2016 dan mulai aktif pada tahun 2017. Dana awal yang 42 disediakan pada tahun 2017 sebanyak Rp 88.677.472 dan pada tahun 2019 BUMDesa Duampanuae kembali menerima suntikan modal sebesar Rp. 180.000.000.

4. Visi misi

Visi:

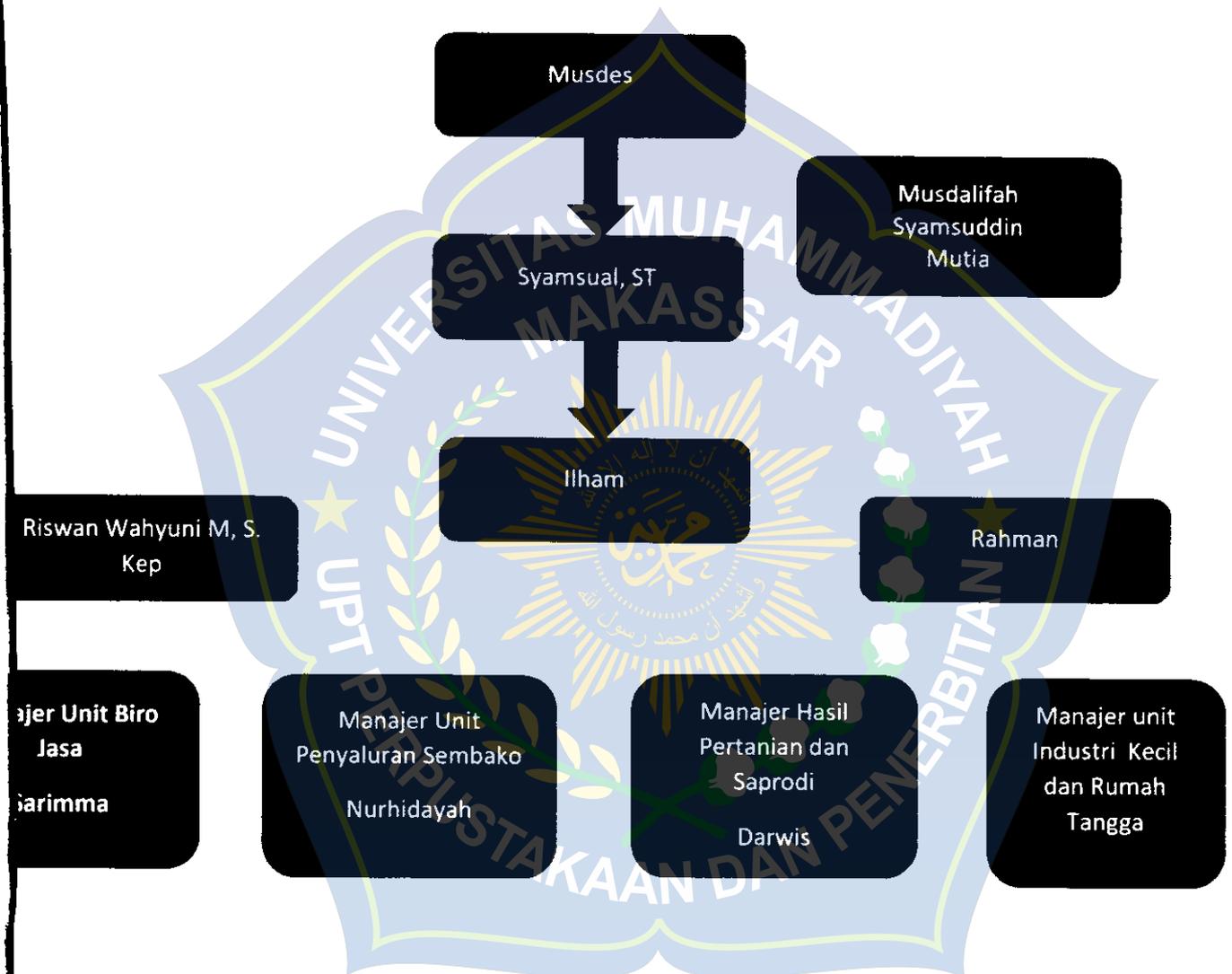
Bumdes "Tombolo Batara Rappoala" adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Rappoala melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social.

Misi:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi desa untuk didayagunakan

d. Membuka pola wirausaha masyarakat.

5. Profil Bumdes Desa



6. Tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian pada struktur manajemen BUMDes.

1. Dewan komisaris

Tugas pokok

- Pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
- Keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
- Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
- *Disseminator* yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
- Negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- Pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
- Penyusun standar kinerja BUMDes

2. Direktur BUMDes

Tugas Pokok:

- Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.
- Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain.
- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang:

- Mendayagunakan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kinerja BUMDes.
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

3. Sekretaris

Tugas Pokok:

- Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan.
- Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang:

- Mendayagunakan sumber daya manusia BUMDes.
- Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- Mewakili Ketua Pelaksana Operasional pada saat Ketua Pelaksana Operasional berhalangan.

4. Bendahara

Tugas pokok:

- Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan.
- Mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes.
- Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.

Wewenang:

- Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDes.
- Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan.

5. Manajer operasional

Tugas Pokok:

- Melakukan pengelolaan unit usaha.
- Mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun.

Wewenang:

- Mendayagunakan sumber daya di tiap unit usaha guna meningkatkan kinerja BUMDes.
- Mendayagunakan sumber daya data dan informasi operasional.

6. Karyawan

- Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
- Bertanggung jawab terhadap Manajer Unit serta membantu dalam melayani konsumen, pengecekan.

B. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi menurut (Mardi Yatmo Hutomo 2000) meliputi:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan

rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek pemberian modal yaitu :

“memang ada anggaran sebesar 120 juta yang di berikan ke Bumdes untuk pengembangan pengelolaan markisa menjadi sirup dan juga Sesuai dengan tujuan dan visi misi Bumdes Tombolo Batara Rappoala maka kebijakannya lebih kepada penekanan regulasi ekonomi masyarakat jadi masyarakatnya yang utama untuk kita kembangkan untuk diberdayakan agar menjadi masyarakat mandiri. Untuk pembuatan program kerja kami melakukan pratinjau sebelumnya karena kita pahami Bumdes Tombolo Batara Rappoala ini minim untuk bidang perbengkelan dan masyarakatnya mayoritas bertani maka kami inisiatifkan untuk mengangkat program kerja perbengkelan dan penggemukan sapi, jadi masyarakat disini mudah terfasilitasi untuk perbengkelan tidak mesti untuk keluar desa untuk servis kendaraan. Dalam menjalankan unit-unit usaha Bumdes Tombolo Batara Rappoala. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kerja yang akan dijalankan tersebut setelah itu kami lakukan pendataan bagi masyarakat khusus masyarakat kurang mampu untuk kami berdayakan dalam unit usaha penggemukan sapi. Kami informasikan sebelumnya pada masyarakat bahwa untuk unit usaha penggemukan sapi yang kami prioritaskan adalah masyarakat yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang berpotensi dibidang perbengkelan kami buka peluang jasa kerja bagi masyarakat yang pengalaman dibidang itu”.(Hasil wawancara HA,09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan visi misi Bumdes Tombolo Batara Rappoala maka kebijakannya lebih kepada penekanan regulasi ekonomi masyarakat jadi masyarakatnya yang utama untuk kita kembangkan untuk diberdayakan agar

menjadi masyarakat mandiri. Untuk pembuatan program kerja kami melakukan pratinjau sebelumnya karena kita pahami Bumdes Tombolo Batara Rappoala ini minim untuk bidang perbengkelan dan masyarakatnya mayoritas bertani maka kami inisiatifkan untuk mengangkat program kerja perbengkelan dan penggemukan sapi, jadi masyarakat disini mudah terfasilitasi untuk perbengkelan tidak mesti untuk keluar desa untuk servis kendaraan. Dalam menjalankan unit-unit usaha Bumdes Tombolo Batara Rappoala. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kerja yang akan dijalankan tersebut setelah itu kami lakukan pendataan bagi masyarakat khusus masyarakat kurang mampu untuk kami berdayakan dalam unit usaha penggemukan sapi. Kami informasikan sebelumnya pada masyarakat bahwa untuk unit usaha penggemukan sapi yang kami prioritaskan adalah masyarakat yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang berpotensi dibidang perbengkelan kami buka peluang jasa kerja bagi masyarakat yang pengalaman dibidang itu.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara direktur Bumdes Tombolo Batara Rappoala terkait pemberian modal yaitu :

“ini telah diatur pada Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Bumdes Tombolo Batara Rappoala memang kita beri modal awal untuk mengembangkan . Besarannya sekitar 25% dari SHU”. (Hasil wawancara PS, 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas telah diatur pada Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Bumdes Tombolo Batara Rappoala memang kita beri modal awal untuk mengembangkan . Besarannya sekitar 25% dari SHU dapat disimpulkan bahwa telah diatur pada Anggaran Dasar Rumah

Tangga (AD/ART) Bumdes Tombolo Batara Rappoala memang kita beri modal awal untuk mengembangkan . Besarannya sekitar 25% dari SHU.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer unit industry kecil dan rumah tangga direktur Bumdes Tombolo Batara Rappoala:

“Yah seperti yang diketahui masyarakat bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Tombolo Batara Rappoala tentunya tidak terlepas dari AD/ART BUMDes Tombolo Batara Rappoala Jadi kita tidak mengganggu sistematis atau pengelolaan dana BUMDes, pemerintah desa tidak mencampuri. Jadi ada beberapa ketetapan persen dari BUMDes untuk memasukkan PAD ke desa.”. (Hasil wawancara MFA, 11 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Tombolo Batara Rappoala tentunya tidak terlepas dari AD/ART BUMDes Tombolo Batara Rappoala. Jadi kita tidak mengganggu sistematis atau pengelolaan dana BUMDes, pemerintah desa tidak mencampuri. Jadi ada beberapa ketetapan persen dari BUMDes untuk memasukkan PAD ke desa.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer unit biro jasa bumdes Tombolo Batara Rappoala yaitu :

“Tujuan awal berdirinya BUMDes Tombolo Batara Rappoala yaitu meningkatkan perekonomian Desa Rappoala, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Rappoala”.(Hasil wawancara ANH, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan awal berdirinya BUMDes Tombolo Batara Rappoala yaitu

meningkatkan perekonomian desa Rappoala, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Rappoala

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat desa Rappoala mengatakan bahwa yaitu :

“Tahun 2017-2019 terjadi peningkatan 2019-2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid 19 yang membuat hampir gugur mengenai persoalan pandemi ini. Sikap yang diambil oleh pemerintah desa yaitu membantu mengelola BUMDes dengan mengalihkan dana dari asupan ADD, dan juga adanya aturan dari Pemerintah Pusat untuk bekerja dirumah sehingga menghambat proses usaha yang di jalankan. Contohnya Pembuatan Paving Blok”.(Hasil wawancara SR, 16 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Tahun 2017-2019 terjadi peningkatan 2019-2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi covid 19 yang membuat hampir gugur mengenai persoalan pandemi ini. Sikap yang diambil oleh pemerintah desa yaitu membantu mengelola BUMDes dengan mengalihkan dana dari asupan ADD, dan juga adanya aturan dari Pemerintah Pusat untuk bekerja dirumah sehingga menghambat proses usaha yang di jalankan. Contohnya Pembuatan Paving Blok.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Rappoala yaitu :

“Jadi awalnya pendapatan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDes begitu besar yaitu pernah mencapai 1 milyar. Namun pada saat kondisi memasuki pandemi dua tahun yaitu tahun 2019-2020 mengalami penurunan karena banyaknya unit-unit usaha yang mengalami sedikit pemesanan seperti usaha Paving blok, dan unit usaha lainnya. Alhamdulillah berkat kerja keras dari pemikiran-pemikiran Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes serta Masyarakat situasi dengan adanya

pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rappoala mengenai Bantuan pembangunan mengatkaan yaitu :

“Upaya yang kami lakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di Desa Rappoala tentang visi dan misi BUMDes, sistem penjualan dan pembayaran BUMDes, serta memberitahukan produk-produk apa yang akan kita jual atau kita pasarkan. Dengan adanya sosialisasi seperti ini masyarakat sudah mulai tau apa saja keuntungan yang diberikan BUMDes untuk membangun Desa dan keuntungan bagi masyarakat Desa”.(Hasil wawancara HA,09 Mei 2022)

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya yang kami lakukan seperti sosialisasi kepada masyarakatmasyarakat di Desa Rappoala tentang visi dan misi BUMDes, sistem penjualan dan pembayaran BUMDes, serta memberitahukan produk-produk apa yang akan kita jual atau kita pasarkan. Dengan adanya sosialisasi seperti ini masyarakat sudah mulai tau apa saja keuntungan yang diberikan BUMDes untuk membangun Desa dan keuntungan bagi masyarakat Desa.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur bumdes Rappoala di Kantor Desa terkait aspek bantuan pembangunan yaitu :

“sebagian masyarakat disini sudah ikut serta dalam pelaksanaan BUMDes, seperti sebagian petani memasarkan hasil taniannya lewat BUMDes otomatis masyarakat dengan mudah mendapatkan keuntungan lewat penjualan itu, kalau dulu petani menjual hasil taniannya ke agen

yang ada dikota sekarang mereka bisa menjualnya lewat BUMDes in".
(Hasil wawancara PS, 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat disini sudah ikut serta dalam pelaksanaan BUMDes, seperti sebagian petani memasarkan hasil taniannya lewat BUMDes otomatis masyarakat dengan mudah mendapatkan keuntungan lewat penjualan itu, kalau dulu petani menjual hasil taniannya ke agen yang ada dikota sekarang mereka bisa menjualnya lewat BUMDes ini.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer unit industry mengatakan bahwa :

"kami dari pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencarikan solusinya sehingga masyarakat tidak memiliki keputus asaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk di pamerankan di kabupaten". (Hasil wawancara MFA, 11 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang

tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencari solusi sehingga masyarakat tidak memiliki keputusasaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk dipamerkan di kabupaten.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan unit biro jasa bumdes yaitu :

“Selain melakukan pendampingan dalam usaha juga BUMDes membantu masyarakat dalam pemasaran jadi selain masyarakat diberikan penyadaran, pelatihan dan difasilitasi masyarakat juga didampingi dalam penjualan hasil usahanya dengan diberikannya bantuan untuk menjual hasil usahanya kepada BUMDes yang telah memiliki mitra dengan pihak lain seperti sale pisang”.(Hasil wawancara ANH, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Selain melakukan pendampingan dalam usaha juga BUMDes membantu masyarakat dalam pemasaran jadi selain masyarakat diberikan penyadaran, pelatihan dan difasilitasi masyarakat juga didampingi dalam penjualan hasil usahanya dengan diberikannya bantuan untuk menjual hasil usahanya kepada BUMDes yang telah memiliki mitra dengan pihak lain seperti sale pisang

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat mengatakan bahwa yaitu :

“Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan”.(Hasil wawancara SR, 16 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan.

Selanjutnya dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan teori yang diamana Menurut Mardi Yatmo Hutomo 2000) meliputi Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tdk akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis, pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat

cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencari solusi sehingga masyarakat tidak memiliki keputusasaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk di pamerkan di kabupaten.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rappoala di kantor desa pada aspek bantuan pendampingan yaitu :

“Iya benar Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan partisipatif dan memandirikan masyarakat”.(Hasil wawancara HA,09 Mei 2022)

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa benar Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk

menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan partisipatif dan memandirikan masyarakat

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara direktur bumdes yaitu :

“Tujuan utama dari pendampingan adalah kemandirian, pendampingan dilakukan agar terkontrol perkembangan setelah adanya penyadaran dan pelatihan. Pendampingan disini dilakukan oleh pengurus BUMDes, sehingga masyarakat bisa melakukan usaha dan meminimalisir kesalahan dalam pembuatan usaha, selain didampingi oleh BUMDes dan di awasi oleh pengawas BUMDes”. (Hasil wawancara PS, 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama dari pendampingan adalah kemandirian, pendampingan dilakukan agar terkontrol perkembangan setelah adanya penyadaran dan pelatihan. Pendampingan disini dilakukan oleh pengurus BUMDes, sehingga masyarakat bisa melakukan usaha dan meminimalisir kesalahan dalam pembuatan usaha, selain didampingi oleh BUMDes dan di awasi oleh pengawas BUMDes.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur bumdes Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek bantuan pendampingan :

“kami dari pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya

bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencari solusi sehingga masyarakat tidak memiliki keputus asaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk di pamerankan di kabupaten". (Hasil wawancara MFA, 11 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan

bahwa pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencari solusinya sehingga masyarakat tidak memiliki keputus asaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk di pamerankan di kabupaten.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer industry mengenai bantuan pendampingan yaitu :

“Selain melakukan pendampingan dalam usaha juga BUMDes membantu masyarakat dalam pemasaran jadi selain masyarakat diberikan penyadaran, pelatihan dan difasilitasi masyarakat juga didampingi dalam penjualan hasil usahanya dengan diberikannya bantuan untuk menjual

hasil usahanya kepada BUMDes yang telah memiliki mitra dengan pihak lain seperti sale pisang”.(Hasil wawancara ANH, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Selain melakukan pendampingan dalam usaha juga BUMDes membantu masyarakat dalam pemasaran jadi selain masyarakat diberikan penyadaran, pelatihan dan difasilitasi masyarakat juga didampingi dalam penjualan hasil usahanya dengan diberikannya bantuan untuk menjual hasil usahanya kepada BUMDes yang telah memiliki mitra dengan pihak lain seperti sale pisang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat terkait bantuan pendampingan yaitu :

“Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan dan Pasal 5 yang ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga BUMDes Tombolo Batara Rappoala tercatat bahwa pelaksana operasional memiliki kewajiban diantaranya yaitu membuat pembukuan seluruh unit-unit usaha BUMDes Tombolo Batara Rappoala secara rinci dan sebenar benarnya, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes Tombolo Batara Rappoala dan memberikan laporan keuangan dan perkembangan kegiatan BUMDes Tombolo Batara Rappoala Kepala Desa Rappoala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kami juga selaku pengurus BUMDes wajib membuat laporan keuangan secara akuntansi setiap periode akhir tutup buku yang kami paparkan pada forum musyawarah desa setiap tahun. Dan kami melaporkan jalannya pengelolaan usaha kepada Dewan Pengawas dan Kepala Desa setiap saat kapanpun diminta”.(Hasil wawancara SR, 23 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan dan Pasal 5 yang ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga BUMDes

Tombolo Batara Rappoala tercatat bahwa pelaksana operasional memiliki kewajiban diantaranya yaitu membuat pembukuan seluruh unit-unit usaha BUMDes Tombolo Batara Rappoala secara rinci dan sebenar benarnya, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes Tombolo Batara Rappoala dan memberikan laporan keuangan dan perkembangan kegiatan BUMDes Tombolo Batara Rappoala kepada Kepala Desa Rappoala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kami juga selaku pengurus BUMDes wajib membuat laporan keuangan secara akuntansi setiap periode akhir tutup buku yang kami paparkan pada forum musyawarah desa setiap tahun. Dan kami melaporkan jalannya pengelolaan usaha kepada Dewan Pengawas dan Kepala Desa Rappoala setiap saat kapanpun diminta.

Selanjutnya dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan teori yang diamana Menurut Mardi Yatmo Hutomo 2000) Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar serta Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan dan Pasal 5 yang ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga BUMDes Tombolo Batara Rappoala tercatat bahwa pelaksana operasional memiliki kewajiban diantaranya yaitu membuat pembukuan seluruh unit-unit usaha

BUMDes Tombolo Batara Rappoala secara rinci dan sebenar benarnya, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes Tombolo Batara Rappoala dan memberikan laporan keuangan dan perkembangan kegiatan BUMDes Tombolo Batara Rappoala kepada Kepala Desa Rappoala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kami juga selaku pengurus BUMDes wajib membuat laporan keuangan secara akuntansi setiap periode akhir tutup buku yang kami paparkan pada forum musyawarah desa setiap tahun. Dan kami melaporkan jalannya pengelolaan usaha kepada Dewan Pengawas dan Kepala Desa Rappoala setiap saat kapanpun diminta. pengurus BUMDes selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melihat kinerja masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dll, karena kadang masyarakat mudah merasa bosan dengan usahanya dan saat ada masalah masyarakat cenderung menyerah untuk melakukan usaha dan meningkatkan usahanya bahkan saat kekurangan bahan baku mereka kadang tidak melanjutkan usahanya, dengan adanya pendampingan maka kita mencari solusi sehingga masyarakat tidak memiliki keputus asaan dalam membuat usaha, selain itu kami juga harus menyerahkan laporan penghasilan setiap bulannya ke kabupaten dan sekitar setahun 2x pemerintah desa datang berkunjung untuk melihat hasil dari usaha yang masyarakat buat dan kadang pemerintah desa meminta dengan pengemasan yang bagus untuk di pamerankan di kabupaten.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersamabersama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek penguatan kelembagaan :

“Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Rappoala perlu diadakan musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam mengelola badan usaha milik desa. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa Rappoala dan Iya benar terdapat pelatihan yang diberikan kepada anggota BUMDes tentang bagaimana mengelola unit-unit usaha yang dijalankan sehingga anggota BUMDes dapat menjalankannya dengan baik tanpa ada kendala pada saat menjalankannya. Seperti pada saat mengelola 50 usaha paving blok dijelaskan mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan agar paving blok dapat kokoh dan tidak mudah hancur”.(Hasil wawancara HA, 09 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Rappoala perlu diadakan

musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam mengelola badan usaha milik desa. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa Rappoala dan Iya benar terdapat pelatihan yang diberikan kepada anggota BUMDes tentang bagaimana mengelola unit-unit usaha yang dijalankan sehingga anggota BUMDes dapat menjalankannya dengan baik tanpa ada kendala pada saat menjalankannya. Seperti pada saat mengelola 50 usaha paving blok dijelaskan mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan agar paving blok dapat kokoh dan tidak mudah hancur.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara direktur bumdes Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek penguatan kelembagaan yaitu :

“Perencanaan di awali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, dari situ kita merencanakan program yang akan direncanakan dan sistem keuangannya itu kita cuma satu pintu yaitu bendahara saja dan Pelatihannya itu sering nak, kemarin itu BUMDes Tombolo Batara Rappoala mengadakan sosialisasi tentang cara pembuatan pupuk yang dikelola oleh BUMDes. Kan pernah itu pupuk-pupuk terbatas namun di desa Rappoala Alhamdulillah tidak merasa kekurangan karena adanya kesediaan pupuk yang dikelola oleh BUMDes dan pemerintah desa sehingga masyarakat ikut tertolong khususnya para petani”. (Hasil wawancara PS, 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan di awali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, dari situ kita merencanakan program yang akan direncanakan dan sistem keuangannya itu kita cuma satu pintu yaitu bendahara saja dan Pelatihannya itu sering nak,

kemarin itu BUMDes Tombolo Batara Rappoala mengadakan sosialisasi tentang cara pembuatan pupuk yang dikelola oleh BUMDes. Kan pernah itu pupuk-pupuk terbatas namun di desa Rappoala Alhamdulillah tidak merasa kekurangan karena adanya kesediaan pupuk yang dikelola oleh BUMDes dan pemerintah desa sehingga masyarakat ikut tertolong khususnya para petani

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer industry Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek:

“Tentunya dalam hal ini persoalan keberhasilan dan perencanaan pengelolaan BUMDes yang dibutuhkan oleh pengurus itu ialah masyarakat yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas dan meningkatkan sumber pendapatan di wilayah tertentu, terutama disetiap dusun (Hasil wawancara MFA, 11 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Tentunya dalam hal ini persoalan keberhasilan dan perencanaan pengelolaan BUMDes yang dibutuhkan oleh pengurus itu ialah masyarakat yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas dan meningkatkan sumber pendapatan di wilayah tertentu, terutama disetiap dusun

Berdasarkan hasil wawancara dengan unit industry Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek pemberian modal yaitu :

““““Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDes hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihi upaya dari anggaran-anggaran BUMDes. Tentu dalam hal ini kami akan 64 merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan planning-planning kedepannya untuk masyarakat BUMDes sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDes

dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa”.(Hasil wawancara ANH, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDes hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihi upaya dari anggaran-anggaran BUMDes. Tentu dalam hal ini kami akan 64 merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan planning-planning kedepanya untuk masyarakat BUMDes sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDes dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Rappoala.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan biro jasa bumdes Desa Rappoala di Kantor Desa terkait aspek yaitu :

“Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rappoala mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Susunan tersebut dihasilkan dalam musyawarah desa agar setiap pengurus 65 yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes paham akan tugas dan tanggungjawab masing-masing agar tujuan dapat tercapai dengan maksima”.(Hasil wawancara SR, 16 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rappoala mempunyai

susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Susunan tersebut dihasilkan dalam musyawarah desa agar setiap pengurus BUMDes yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes paham akan tugas dan tanggung

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat bahwa yaitu :

““Untuk membangun suatu komunikasi antara tim kerja sangat dibutuhkan persoalan kerjasama, persoalan transparansi dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan komunikasi kerja. Dan BUMDes di Desa Rappoala pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan pada saat ini BUMDes Tombolo Batara Rappoala masuk dalam kategori aktif dalam mengelola” (Hasil wawancara RA, 23 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Untuk membangun suatu komunikasi antara tim kerja sangat dibutuhkan persoalan kerjasama, persoalan transparansi dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan komunikasi kerja. Dan BUMDes di Desa Rappoala pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan pada saat ini BUMDes Tombolo Batara Rappoala masuk dalam kategori aktif dalam mengelola.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat bahwa yaitu :

“Dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes Tombolo Batara Rappoala guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang

diinginkan dapat tercapai Kami pengelola BUMDes tetap melakukan planning step by step atau perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDes dan tetap melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan persoalan membangun komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.”(Hasil wawancara PD, 24 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes Tombolo Batara Rappoala guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai Kami pengelola BUMDes tetap melakukan planning step by step atau perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDes dan tetap melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan persoalan membangun komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.

Selanjutnya dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan teori yang diamana Menurut Mardi Yatmo Hutomo 2000) Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok.

Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersamabersama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDes hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihi upaya dari anggaran-anggaran BUMDes. Tentu dalam hal ini kami akan 64 merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan planning-planning kedepanya untuk masyarakat BUMDes sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDes dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Rappoala serta dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes Tombolo Batara Rappoala guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai Kami pengelola BUMDes tetap melakukan planning step by step atau perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDes dan tetap melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan

persoalan membangun komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian modal sebesar 120 juta yang di peruntukkan ke bumdes dalam hal ini pengembangan pengelolaan buah markisa menjadi minuman sirup, tujuan dan visi misi Bumdes Tombolo Batara Rappoala maka kebijakannya lebih kepada penekanan regulasi ekonomi masyarakat jadi masyarakatnya yang utama untuk kita kembangkan untuk diberdayakan agar menjadi masyarakat mandiri. Untuk pembuatan program kerja kami melakukan pratinjau sebelumnya karena kita pahami Bumdes Tombolo Batara Rappoala ini minim untuk bidang perbengkelan dan masyarakatnya mayoritas bertani maka kami inisiatifkan untuk mengangkat program kerja perbengkelan dan penggemukan sapi, jadi masyarakat disini mudah terfasilitasi untuk perbengkelan tidak mesti untuk keluar desa untuk servis kendaraan.

Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

B. Saran

1. Perlunya perhatian besar dari pihak pemerintah kepada badan usaha milik desa guna memberdayakan masyarakat sekitar
2. Perlunya pendampingan khusus kepada bumdes tersebut guna untuk dikembangkan sebaik mungkin
3. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan bumdes tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali, dkk., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013 *teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif*. Jurnal majala ilmiah pawitaan. Voll 20 No. 01. Diakses pada 15 oktober 2018 (Mardi Yatmo Hutomo 2000) meliputi:
- Fredian Tonny Nasution, 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2014), Hlm. 89.
- Bintarto, R. Prof. Dr. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Djohani, R. 2003. *Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga Moleong, J Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartasmita Ginandjar, 1996 *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo)
- Moleong, Lexy j. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasdian, Fredian Tony. 2014. "Pengembangan Masyarakat". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharyanto, Hastowiyono, *Pelebagaan BUM Desa* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa)
- Sumodiningrat. 2000. *Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol.12 No.2.
- Wahyudin kessa, 2015. *Perencanaan pembangunan desa*; Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia

Zamzami, 2009. *Memberdayakan ekonomi rakyat kecil*; Bandung : Pt Remaja Rosdakarya), hal. 56-57.

Zubaidi,2013. *Pengembangan masyarakat* ; Jakarta : kencana Prenada Media Group, hal. 43.



RIWAYAT HIDUP



Rahmat Hidayat lahir di Jeneponto pada tanggal 13 Agustus 1997 dari pasangan suami istri ayahanda Sainuddin dan Ibunda Hj. Norsiah, S.Pd yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis beralamat di Dusun Rappoala Desa Rappoala, Kec Tompobulu. Kab. Gowa

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2003 di SD Negeri Rappoala dan tamat pada tahun 2009.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tompobulu hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Gowa dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk program strata satu (S1).

Dengan usaha, doa, ketekunan serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak penulis berhasil mengerjakan tugas akhir skripsi ini.